



Volume 16 No. 1 Juli 2025

Page: 13-23

Received: 21-05-2025
Revised Received: 21-05-2025

Accepted: 12-06-2025
Online Available: 17-07-2025

DIGITAL MOVEMENT OF OPINION (DMO) ATAS KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN GAS DARI KEMENTERIAN ESDM DALAM PLATFORM X

***DIGITAL MOVEMENT OF OPINION (DMO) ON THE GAS
DISTRIBUTION POLICY OF THE MINISTRY OF ENERGY
AND MINERAL RESOURCES IN PLATFORM X***

**Terrizqo Arief Sutansyah^{1 a)}, Radita Gora Tayibnafis²,
dan Syaiful Halim³,**

¹Magister Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, Indonesia

²Magister Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, Indonesia

³ Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Mathlaúl Anwar Banten,

Jl. Raya Labuan KM 23 Cikaliung, Pandeglang, Banten 42273, Indonesia

^{a)}e-mail: terrysutansyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan, untuk mendeskripsikan digital movement of opinion terkait kebijakan pendistribusian gas dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral pada Februari 2025 di platform X. Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma konstruktivistik dan metode netnografi. Hasilnya, tiga varian digital movement of opinion yang bermuara kepada sentimen negatif, serta pembuktian keberadaan ruang publik baru bernama platform X. Pada akhirnya, ruang publik ini memberikan gambaran soal bentuk-bentuk rasionalitas kritis netizen dalam membaca situasi politik dan dampak sosial yang ditimbukannya, serta harapan perubahan dari sebuah kebijakan pemerintah. Implikasi atas temuan ini adalah pemahaman atas pola-pola komunikasi yang menggambarkan partisipasi aktif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial.



©2025 – Orasi : Jurnal Dakwah dan Komunikasi by
<http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/index> This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Indexed by: SINTA, Google Scholar, Moraref, Portal Garuda, BASE, ROAD, etc

Kata Kunci: Digital Movement of Opinion, Kementerian esdm, Netizen, Netnografi, Platform x

ABSTRACT

This study aims to describe the digital movement of opinion related to the gas distribution policy from the Ministry of Energy and Mineral Resources in February 2025 on platform X. This qualitative research uses a constructivistic paradigm and netnography method. As a result, three variants of the digital movement of opinion that lead to negative sentiment, as well as proof of the existence of a new public space called platform X. In the end, this public space provides an overview of the forms of critical rationality of netizens in reading the political situation and the social impact it causes, as well as the hope of change from a government policy. The implication of these findings is an understanding of communication patterns that describe the active participation of the community in government policies through social media.

Keywords: Digital movement of opinion, ministry of energy and mineral resources, netizens, netnography, platform x

1. Pendahuluan

Pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa “pemerintah menerbitkan kebijakan berupa larangan menjual gas LPG tiga kilogram ke pengecer per 1 Februari 2025 dan pembelian hanya bisa diakses melalui agen resmi dari PT. Pertamina” (Tempo.co, 2025) membangun kegaduhan di tengah masyarakat. Pasalnya, kebijakan ini, membuat masyarakat kelas bawah resah karena kesulitan mendapatkan gas dalam tabung melon tersebut. Sebelum ini, masyarakat kelas bawah dihadapkan berbagai kesulitan ketika mereka berkeinginan mendapat gas.

“Pangkalan gas mewajibkan masyarakat agar menyertakan KTP saat membeli kebutuhan primer ini” (Kumparan.com, 2025). Antrean memburu tabung gas terjadi sejumlah daerah. Bahkan, “seorang ibu di Pamulang, Tangerang Selatan,

tewas akibat kelelahan dalam mencari gas” (Detik.com, 2025).

Warga dunia maya pun merayakan kegaduhan ini di media sosial, termasuk warga platform X, dengan suka cita. “Media ini memiliki sifat *hybrid*, yakni sebagai media massa dan media pribadi atau komunikasi diri massa” (Castells, 2013). Karakter lain, “ia memiliki jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, dan konten dari pengguna” (Gunawan dan Ratmono, 2023). Melalui platform X, netizen dapat menyatakan ekspresi pribadinya secara terbuka kepada publik, untuk berpartisipasi dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini terlihat bahwa “media baru sangat penting ketika menganalisis keterlibatan kaum muda dalam aksi kolektif dan gerakan sosial transnasional yang lebih baru” (Zubieta *et. al*, 2023). Keberadaan anak muda dalam penelitian ini mengacu kepada “siswa” atau setingkat SMA

yang diasumsikan memahami persoalan lingkungan (Zubieta *et. al.*, 2023).

Pada akhirnya, opini publik pun terbentuk. Platform X mentransmisikan pesan dari para netizen secara massif dan mengubah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah menjadi polemik dan cenderung kontra atas kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, netizen menggunakan *keyword* dan tagar demi membangun gerakan sosial dan aktivitas digital yang disebut *digital movement of opinion* (DMO). “Fenomena gerakan opini digital dengan menggunakan tagar (#) kerap muncul dalam media sosial” (Setiamukti dan Nasvian, 2023).

“Tagar memudahkan kategorisasi berdasarkan minat yang sama, sehingga penyebarluasan informasinya pun menjadi semakin mudah dan efisien” (Gunawan dan Ratmono, 2021). Selain tagar, gerakan ini juga memberdayakan pemilihan *keyword* yang spesifik.

Terbukanya akses netizen untuk menyatakan pikiran, tanpa adanya intervensi kekuasaan dan pasar, menjadi keluarbiasaan platform X sebagai ruang publik, sekaligus “memediasi negara dengan individu (Crossley dan Roberts, 2004). Menurut Sensat dalam Rahman dan kawan-kawan (2023), “bentuk ruang publik di media baru diklasifikasikan dalam lima kategori, yakni *e-government*, *advocacy/activist domain*, *civic forums*, *parapolitical domain*, dan *journalism domain*”. Batasan ini melampaui gagasan Habermas yang menempatkan kedai kopi,

salon, dan jurnal yang berisi sekelompok terdidik pada abad 18 sebagai ruang publik.

Keberadaan platform X sebagai ruang publik baru (*new public sphere*) bersifat maya yang menyediakan wadah berkomunikasi berbasis teks dan jumlah karakter terbatas tengah diuji. “Ruang publik baru lahir dari media baru yang menimbulkan irisan antara budaya populer dan kehidupan sehari-hari” (Rahman *et. al.*, 2023). Irisan ini menghadirkan budaya kebebasan berpendapat secara ekspresif mengenai berbagai jenis permasalahan, baik itu bersifat publik maupun privat. Berdasarkan karakter dimensi substansi dan fungsinya, keberadaan platform X berpotensi menyamai konsep ruang publik Habermas. Dengan demikian, media baru sebagai ruang publik hendaknya tidak boleh ada intervensi dari penguasa, baik dalam mengendalikan opini, penyebaran hoax, maupun menyebarkan pesan melalui *buzzer*.

Dalam konteks kebijakan pendistribusian gas untuk kalangan masyarakat miskin, terhitung sejak 4 Februari 2025 warga platform X memberikan beragam komentar. Diskusi dan perdebatannya mengalir secara terbuka dan bebas dari intervensi. Latar belakang berpondasikan gagasan ruang publik baru ini yang menjadi alasan terpenting, untuk menjadikan media sosial tersebut sebagai objek penelitian.

Sebelum ini, Zubieta dan kawan-kawan (2023) meneliti gerakan dan aktivisme digital melalui *Twitter* tentang *Fridays for Future (FFF)* atau Hari Iklim Global pada 25 September 2020. Hasil risetnya menunjukkan,

“gerakan aktivisme digital melalui *Twitter* mengenai hari iklim global pada Jumat memberikan kontribusi dalam menjelaskan permasalahan, memberi solusi dan motivasi kepada pemangku kebijakan dan masyarakat” (Zubieta *et. al.*, 2023).

Sumartias dan kawan-kawan (2023) melalui riset bertajuk *Democracy in the Indonesian Digital Public Sphere: Social Network Analysis of Twitter Users' Responses to the Issue of Nationalism Knowledge Test at the Corruption Eradication Commission (TWK-KPK)* mengungkapkan bahwa “pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 tidak menghentikan publik dalam menyatakan pendapatnya”. Riset ini dilatarbelakangi peristiwa tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Mei 2021.

Rahman dan kawan-kawan (2023) mengkaji isu penundaan pemilu pada 2024 silam melalui riset berjudul *Ruang Publik Baru dan Perubahan Sosial: Pemanfaatan Internet Untuk Advokasi dan Diseminasi Isu Penundaan Pemilu Studi Kasus Mafindo dan Drone Emprit*. Kesimpulannya, “*Twitter* sebagai media sosial menjadi ruang publik baru sehingga membuka perubahan sosial di masyarakat”. Dalam riset ini, narasi melalui *Twitter* berhasil membentuk narasi kritik dan kontra terkait pengakuan Menko Marves Luhut Panjaitan yang mendapatkan dukungan dari 110 juta warga net terkait penundaan pemilu.

Setiamukti dan Nasvian (2023) mengkaji retorika deliberative dengan *hashtag #SepakatDamai* di *Twitter* sebagai bentuk

peran aktif pendukung sepak bola dan masyarakat umum, untuk membangun perdamaian dan mengurangi pertikaian terkait tragedi Kanjuruhan. Kesimpulannya, “*hashtag #SepakatDamai* berhasil memobilisasi opini publik melalui retorika deliberatif”.

Sementara Fachrurrazi (2025) melalui riset berjudul *New Public Sphere di Indonesia: Peran Media Sosial dalam Mengkonstruksi Diskursus Publik di Dunia Maya* mengkaji konstruksi diskursus publik dunia maya melalui media sosial. Hasil penelitiannya, “media sosial membuat penggunanya berpartisipasi dan berbagi melalui jejaring social, sehingga memengaruhi kehidupan sosial di masyarakat”.

Penelitian ini mencoba mengkaji potensi platform X sebagai ruang publik baru dalam dunia maya, dengan fokus kepada *digital movement of opinion* (DMO) terkait kebijakan pendistribusian gas dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral pada Februari 2025. Penelitian ini bertujuan, untuk mendeskripsikan varian-varian dari opini yang dari polemik terkait wacana dari kementerian terkait sebagai representasi dari keberadaan ruang publik baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta dengan paradigma konstruktivistik dan metode netnografi.

2. Metodologi Penelitian

Pisau bedah yang digunakan dalam penelitian ini adalah netnografi, yakni “metode yang digunakan untuk mempelajari dan

memahami kehidupan atau budaya di internet” (Eriyanto, 2021). Upaya memahami ini didapat dari jejak digital berupa cuitan berisikan *keyword* dan tagar tertentu, atau komentar dan emoji yang disampaikan pada kolom komentar terkait cuitan dari netizen lain yang menyertakan *keyword* dan tagar tertentu.

Dibandingkan riset-riset terdahulu seperti telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan varian lain dari *digital movement of opinion* (DMO) dan keberadaan ruang publik baru bernama platform X. Langkah awal untuk mendapatkan data penelitian adalah menambang data (*crawling*) *big data* (mahadata) melalui proses *mining* dengan bahasa pemrograman Phyton pada periode waktu 15 Maret 2025 hingga 2 Maret 2025. Teknik ini dimaksudkan, untuk mendapatkan *keyword* yang paling menonjol dari tema yang tengah menjadi polemik. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan *snowball sampling* dari diskusi terbuka di platform X, dengan *keyword* ‘Bahlil’, ‘Bapak Menteri’, dan ‘gas lpg 3kg’.

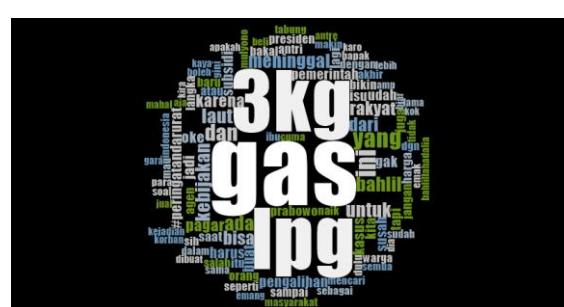
Sementara teknik analisis data meliputi *open coding*, yakni membuat kategori atas informasi; *axial coding*, yakni memilih satu kategori dan menempatkannya dalam satu model teoritis; dan *selective coding*, yakni merangkai cerita dari antar hubungan kategori ini. Berikutnya, menyalin dari komunitas *online* secara langsung, menulis hasil pengamatan, serta mengklasifikasikan pesan pada topik hingga mengategorikan pesan dalam jaringan wacana yang terbentuk mengenai isu kebijakan gas dari kementerian

terkait. Pengolahan hasil *coding* data dan visualisasi data menggunakan *NVivo* sebagai *tools* penunjang dari penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas dalam tabung melon, kebijakan pangkalan gas yang mewajibkan pembeli tabung gas agar menyertakan KTP saat membelinya, antrean memburu gas tiga kilogram di sejumlah daerah, dan seorang ibu yang tewas akibat kelelahan dalam mencari gas merupakan rangkaian peristiwa yang memancing kegaduhan di dunia maya, khususnya platform X. Kegaduhan semakin menjadi-jadi ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan berupa latar belakang pemberlakuan kebijakan pendistribusian gas tiga kilogram ke pengecer dan agen resmi dari PT. Pertamina.

Jejak digital kegaduhan di platform X terkait kedua peristiwa itu terlihat dalam rupa *word cloud*—perhatikan Gambar 1.

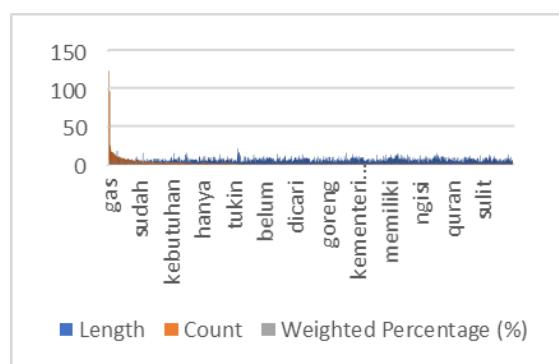


Gambar 1. *Word Cloud* Interaksi Netizen mengenai Kebijakan Pendistribusian Gas (Sumber: Olahan Peneliti, 2025).

Gambar 1 yang merupakan olahan dari aplikasi *NVivo* memperlihatkan bahwa intensitas tertinggi ditempati kata kunci ‘3kg’,

‘gas’, dan ‘lpg’. Ketiga kata kunci ini merupakan kecenderungan kata yang muncul dari komentar-komentar dari warga platform X terkait kebijakan pendistribusian gas oleh Kementerian ESDM. Beberapa kata kunci lain juga bermunculan. Meski demikian, kata kunci tersebut tidak secara otomatis merujuk kepada fokus penelitian.

Selin mencermati *word cloud*, penelitian juga diarahkan kepada *word count* guna melihat rupa kata kunci dan angka statistiknya. Olahan dari aplikasi NVivo memperlihatkan sejumlah kata kunci dengan kurva dan angka statistik di dalamnya—perhatikan Gambar 2.



Gambar 2. Word Count Komentar Netizen Platform X mengenai Kebijakan Pendistribusian Gas
(Sumber: Olahan Peneliti, 2025).

Kata-kata kunci yang bermunculan dari kedua gambar di atas merupakan representasi dari beragam cuitan dan komentar netizen terkait kebijakan pendistribusian gas dari Kementerian ESDM. Secara garis besar, pernyataan-pernyataan tersebut merupakan reaksi atas dampak dari peristiwa. Persisnya, terkait dampak kelangkaan gas dalam tabung melon yang berujung kepada antrean panjang di pangkalan gas di sejumlah daerah dan

munculnya korban jiwa dari peristiwa tersebut. Pemberitaan massif dari media *mainstream* menjadi referensi para netizen dalam memahami konflik sosial yang terbangun dari kebijakan pemerintah ini.

Akun *@ironmantul* mencuit. “taxfraudism tanyakanrl Emosi gw anjing 350-400rb dpt kosongan 12kg punya 2-3 gas 3kg an bisa dpt satu bangsat lu ngisi 12kg sekali sama aja bisa 5 kali 3kg kepakenya bahkan bisa lebih bandingin harganya bangke jempol lu sekolahin bangke keliatan gak prnh pake gas lpg aja pake ngegas goblok2an”. *Tweet* berasal dari pengalaman pribadi juga diungkapkan dalam akun *@terasalam*, “Heraloebss gibran_tweet Gas LPG 3kg saat ini adalah Kebutuhan Vital dalam RT dalam melangsungkan kehidupan di Msyrkt bawah. Jgn coba² dijadikan Kelinci Percobaan hanya utk menjalankan Kebijakan yg tdk Populer. Belum tahu dia kalau Gas habis ketika sedang memasak bisa bergetar dinding dibuat emak²”.

Akun *@Oslashwave* menuliskan, “Mentri kurangin 3kg LPG gas buat membantu rakyat Tiba tiba seorang emak-emak meninggal karena kesusahan menyari 3kg LPG gas. Mayoritas tokoh makanan ditutup karena kesusahan 3kg LPG gas tersebut karena kalo kita ga punya gas gimana bisa masak atau cari duit?”.

Akun *@haienci* yang merupakan pemilik sebuah warung men-tweet, “Nyokap gua punya warung dia tau ga berapa keuntungan jualan gas lpg 3kg cuma 2ribu perak! Sampe orang komplek ngebombardir nyokap gua nanyain gas mak gua juga bingung

karena agennya ga pada ada. Bahkan kmrn ada yg lagi masak bekel buat anaknya keabisan gas. Manusia jahatttt”.

Sementara netizen lain mengaitkan kebijakan dari Kementerian ESDM ini dengan Presiden Prabowo. Mereka menyebut nama Presiden Prabowo secara langsung atau mengingatkan kembali *tagline* ‘oke gas’ yang digunakan oleh sang presiden saat berkampanye dulu. Akun *@lyalyalyaa* menuliskan, “1. PPN 12% 2. Gas LPG 3kg 3.”, yang merupakan daftar kebijakan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat.

Akun *@Am_IDF* menyatakan, “Mr realDonaldTrump Belum 2 Minggu jadi Presiden kebijakannya sdh ratusan yg di sign? #GREAT Mr prabowo Indonesia dgn segudang menterinya sudah 100 hari lebih satu kabinet urus gas LPG 3kg ga becus sampai ada yg tewas malah ketum PAN minta rakyat memuji presiden..?#OMON”. Pernyataan ini merupakan sindiran terbuka terkait seratus hari perjalanan pemerintahan Prabowo yang dikaitkan dengan kalimat Presiden Prabowo saat berdebat dengan kandidat calon presiden Anies Baswedan, yakni ‘omon-omon’.

Akun *@AboeHayat* menuliskan, “Ok gas Kompas harus tanggungjawab neh terhadap surveynya. Kasus PIK OCCRP perampasan lahan sertifikat palsu ijazah palsu LPG 3kg dan lain-lain masih nunggu di KPK. #PeringatanDarurat”. Pernyataan ini menaikkan kekecewaan atas kebijakan pendistribusian gas dari Kementerian ESDM

dengan survey OCCRP, serta berbagai kasus dalam institusi KPK.

Komentar negatif bernuansa komedi juga disematkan oleh netizen, baik dalam bentuk bahasa daerah. Akun *@atheon24* menuliskan, “Ternyata gas lpg 3kg kmrn dibikin langka buat dipake para pejabat buat nge-fly Galaxy gas addict ah decision making”. Sementara akun *@reinaoifarm* menyatakan, “meimfarm udh antri gas lpg 3kg blm hari ini?”.

Akun *@sekiagani* memberikan pernyataan, “lama-lama mungkin damkar menyelesaikan masalah gas LPG 3kg”. *Tweet* ini mengomparasikan keberhasilan pemadam kebakaran dalam merespons segala bentuk kebutuhan masyarakat dengan permasalahan kelangkaan gas.

Akun *@kesitt* menyatakan, “Ora mung joget joget oke gas oke gas tapi gas lpg 3kg susah golekane iki rakyat lil bahlil bukan kelinci percobaan”. Pernyataan ini memiliki arti, oke gas, oke gas, tapi rakyat cari gas LPG tiga kilogram itu susah. Ini Rakyat Lil Bahlil, bukan kelinci percobaan. Cuitan berbahasa Jawa ini merupakan gambaran kesulitan masyarakat dalam mencari gas yang berbeda dengan kampanye Presiden Prabowo, yaitu ‘oke gas’.

Tweet negatif berbahasa Jawa juga disematkan dalam akun *@dembloya*, “aku karo gas lpg 3kg ki podo podo podo langka”. Artinya, yang menyatakan dirinya sendiri dan gas sama-sama langka. Sementara akun *@txtdaridery* menuliskan dalam terjemahan bebas bahwa aku kok penasaran ya sama

pemerintah, sekarang modelnya buat kebijakan sendiri tapi yang ngebatalin ya dia sendiri: PPN 12% Gas LKG 3Kg. *Tweet* ini merupakan ekspresi kebingungan atas inkonsistensi pemerintah dalam mencanangkan kebijakan tetapi juga membatalkannya secara sepihak.

Gerakan opini digital netizen di platform X juga ditunjukan melalui narasi bahwa kebijakan pendistribusian gas merupakan pengalihan isu dari pemerintahan Presiden Prabowo dalam menutupi isu pagar laut dan korupsi dari pemerintah Presiden Jokowi. Hal ini ditunjukan oleh akun *@AiraNtieReal* yang menyatakan, “JoeTirtoDiputro Pengalihan isu teroos Gas LPG 3kg udah skrg rumah Yapo digeledah bentar lagi isu Bahlil nyalon wapres 2029(katanya)”. *Tweet* ini menghubungkan peristiwa penggeledahan rumah Yapo dengan adanya dugaan bahwa Menteri Bahlil akan sempat digosipkan *nyalon* sebagai wakil presiden.

Akun *@_memoryusang* menuliskan “Good afternoon guys.... Usahakan tetap focus kepada kasus PAGAR LAUT ya gaes... Jangan sampai dgn adanya kelangkaan gas LPG 3kg membuat kita lupa dgn pagar laut yg blom selesai kasusnya. Apalagi buzzer pagar laut udah dapat briefing agar kasus ini dinormalisasi. Cukup sekian”. *Tweet* ini menyarankan bahwa sebaiknya masyarakat untuk fokus kepada isu pagar laut yang melibatkan Konglomerat Aguan dan Presiden Joko Widodo.

Akun *@sharpandshark* menyatakan, “Oligarki atau Aguan ini saat diserang maka

kebijakan si Bahlil langsung buat Gas LPG 3kg jadi langka. Pengalihan ini pola si Imigran terus keluarlah ternak-ternak yg diberi sumpelan”. Dalam bahasa berbeda, *tweet* ini mengungkapkan bahwa polemik kebijakan gas ini sebagai bentuk pengalihan isu dari isu imigran agar masyarakat tidak memikirkan hal tersebut.

Akun *@Alexalitopo* menuliskan, “Food Estate di Merauke Papua Selatan untuk Ketahanan Pangan Nasional Innalillahi Morningg Rabu Pagii Ciawi Melani Sarapan Carmen Dyandra Lotte SNBP Nadiem Kebijakan LPG 3kg Bahlil Knapa Perusak Agen Pertamina Pengalihan Presiden Pak Bowo Oke Gas #PeringatanDarurat”. *Tweet* ini menyatakan bahwa target pengalihan isu di sini adalah isu *food estate* yang melibatkan Presiden Prabowo.

Komentar netizen dalam menanggapi kebijakan pendistribusian gas oleh Kementerian ESDM juga merupakan hasil rasio kritisnya sesuai dengan pemberitaan media massa dan mengaitkannya dengan wacana baru yang sedang dibangun. Sejumlah media nasional memberitakan bahwa kelangkaan gas tiga kilogram menelan korban jiwa. Akun *@BigwinNuy17* menyatakan bahwa “Heraloebss Dosa jariah bahlil...udah 2 ibu2 meninggal Krn mencari gas LPG 3kg #PeringatanDarurat”. *Tweet* ini menegaskan bahwa Menteri Bahlil telah berdosa karena menyebabkan kematian seorang ibu karena mencari gas.

Akun *@NdoeL_2011* menuliskan, “Bukannya berduka malah berkata yg kurang

simpatik. Bayangkan pak akibat kebijakan yg asal asalan Ibu ini Penjual Makanan jadi repot mencari gas untuk masak. Harus antri panjang dan lama shg kelelahan dan sakit sampai meninggal. Presiden Mulyono Agen Oke Gas LPG 3kg #GasMelon”. *Tweet* ini mengungkapkan persoalan etika dari seorang menteri dalam merespon kabar duka dari warga yang meninggal.

Akun *@eunoiaaa04* juga merespon persoalan yang sama, “ada yg meninggal krna harus antri Gas LPG 3kg ada yg harus kehilangan kontrak sebagai KI setelah kerja bertahun2 krna anggaran kementerian dipotong sedemikian rupa demi makan gratis. jadi pengangguran krna kebijakan dari presiden yg dia pilih sendiri. kocak”. *Tweet* ini menyatakan kebijakan pendistribusian gas tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga kekecewaannya terkait persoalan ketenagakerjaan. Banyak warga yang menjadi pengangguran akibat anggaran kementerian dipangkas untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Masih dalam konteks warga yang meninggal dunia setelah berburu gas, netizen juga mengungkapnya dalam ekspresi berbeda. Akun *@PaltiWest2024* menuliskan, “Pedagang Siomay yang hidup dan keluarganya dari jualan Siomay harus meninggal karena keliling cari Gas LPG 3kg. Salah pilih pemimpin salah pilih menteri salah kebijakan akhirnya rakyat satu per satu mati. Mirisnya negeriku yang katanya kaya ini”. *Tweet* ini menyatakan adanya pedagang siomay yang meninggal dunia akibat peristiwa kelangkaan gas dan

terhubung kepada kegagalan dalam memilih pemimpin.

Secara garis besar, hasil *coding* dengan menggunakan aplikasi *NVivo* di atas memunculkan tiga arus wacana dari perbincangan di platform X. *Pertama*, sentimen negatif secara sarkastik terkait kebijakan pendistribusian gas dan sosok Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. *Kedua*, sentimen negatif secara satir yang menempatkan wacana ini sebagai pengalihan isu terkait peristiwa pagar laut. *Ketiga*, sentimen negatif secara ironi yang mengangkat korban jiwa sebagai dampak dari kebijakan pemerintah.

Pada dasarnya, ketiga arus wacana yang dimunculkan dari *big data* tersebut mengarah kepada satu konsep kunci, yakni ‘sentimen negatif’ yang tersaji dalam tiga varian. Meski demikian, muara dari seluruh pernyataan tersebut mengarah kepada penolakan atas kebijakan pendistribusian gas dari Kementerian ESDM.

Selain itu, ketiganya merupakan implementasi dari DMO di ruang publik baru yang kehadiran terjadi secara spontan atau tidak dimobilisasi oleh pemimpin atau organisasi tertentu. Implementasi DMO yang umumnya diarahkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merupakan “bentuk menyuarakan gerakan dalam dunia digital” (Sulistiyati, 2024). Sentimen negatif dari warga platform X merupakan representasi dari pengalaman pribadi, kesaksian atas situasi di lapangan, dan referensi dari media massa.

4. Simpulan dan Saran

Digital movement of opinion (DMO) terkait kebijakan pendistribusian gas dari Kementerian ESDM pada Februari 2025 menyajika tiga varian opini, yakni reaksi atas peristiwa dan dampak dari kelangkaan gas, keterkaitan kebijakan dari Kementerian ESDM ini dengan kampanye Presiden Prabowo, dan pengalihan isu terkait polemik pagar laut dan korupsi dari pemerintah Presiden Jokowi. Ketiganya mengarah kepada konsep kunci ‘sentimen negatif’ berupa penolakan atas kebijakan pendistribusian gas dari Kementerian ESDM.

Implementasi DMO melalui platform X membuktikan pemunculan *new public sphere* yang melampaui konsep ruang publik Habermas. Melalui media sosial, interaksi dan peristiwa demokrasi yang berlangsung secara terbuka, tanpa menunggu kehadiran pemimpin yang memobilisasi. Rasionalitas netizen menjelma menjadi gerakan opini digital berupa penyampaian gagasan, pendapat, dan kritik kepada pemerintah secara lugas dan terbuka, sekaligus menjadi diskusi terbuka di ruang publik berbasis internet.

Masih dibutuhkan penelitian lanjutan terkait persoalan sosio-kultural yang tersaji dan tersimpan dalam bentuk *big data*. Jawaban demi jawaban yang tersaji dalam bentuk riset ini menghadirkan perspektif baru yang lebih aktual dan konseptual. Manfaat besar dari kegiatan ini bukan hanya terhubung kepada manfaat akademis, tapi juga manfaat praktis dan manfaat sosial.

Daftar Pustaka

- Castells, M. (2013). *Communication Power*. London: Oxford University Press.
- Crossley, Nick; Michael Roberts, J. (2004). *After Habermas: New Perspectives on the Public Sphere*. London: Oxford dan Malden MA.
- Detik.com. (2025). *Viral Ibu Meninggal Saat Antre LPG 3 Kg di Pamulang, Begini Faktanya*. Diakses pada 26 April 2025 dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-7762075/viral-ibu-meninggal-saat-antre-lpg-3-kg-di-pamulang-begini-faktanya>.
- Eriyanto. (2021). *Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*. Bandung: Rosda Karya.
- Fachrurrazi. (2025). New Public Sphere di Indonesia: Peran Media Sosial dalam Mengkonstruksi Diskursus Publik di Dunia Maya. *Jurnal ReviewPendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 804–810. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Gunawan, Budi dan Ratmono, B. M. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Budi dan Ratmono, B. M. (2023). *Medsos di Antara Dua Kutub*. Bandung: Rayyana Komunikasindo.
- Kumparan.com. (2025). *Dibikin Mumet Kebijakan Gas Elpiji 3 Kg*. Diakses pada 26 April 2025 dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dibikin-mumet-kebijakan-gas-elpiji-3-kg-24TW2NJ6U0l>.
- Rahman, Mila Amalia; Afifah, Zahra Nur; Ma'rifah, Iza; Lestari, Dewi Laras; Heryanto, Gun Gun; dan Hermansah, T. (2023). Ruang Publik Baru dan Perubahan Sosial: Pemanfaatan Internet untuk Advokasi dan Diseminasi Isu Penundaan Pemilu Studi Kasus Mafindo dan Drone Emprit. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(3), 554–565. <https://doi.org/https://doi.org/10.33822/je.p.v6i3.6109>.
- Setiamukti, Muhammad Fadhlillah dan

Nasvian, M. F. (2023). Social Network Analysis #UsutTuntas Pada Media Sosial Twitter (Data Twitter 11 November 2022). *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 124–137. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33822/jep.v6i1.5427>

Sumartias, Suwandi; Pulubuhu, Dwia Aries Tina; Sudarmono, Sudarmono; Adi, Achwan Noorlistyo; dan Ratnasari, R. (2023). Democracy in the Indonesian Digital Public Sphere: Social Network Analysis of Twitter Users' Responses to the Issue of Nationalism Knowledge Test at the Corruption Eradication Commission (TWK-KPK). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(3), 240–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.70896>.

Tempo.co. (2025). *Fakta-fakta Kebijakan Distribusi Elpiji 3 Kg: Pelarangan, Kelangkaan hingga Subpangkalan*. Diakses pada 26 April 2025 dari <https://www.tempo.co/arsip/fakta-fakta-kebijakan-distribusi-elpiji-3-kg-pelarangan-kelangkaan-hingga-subpangkalan-1203977>

Zubieta, Fernandes Ana; Guevara, Antonio Guevara; Roldan, Rafael Caballero; dan Robles, J. M. (2023). Digital Activism Masked—The Fridays for Future Movement and the “Global Day of Climate Action”: Testing Social Function and Framing Typologies of Claims on Twitter. *Social Sciences*, 12(12), 679. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/socsci12120676>.